

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pendidikan Luar Biasa sebagai kebutuhan dasar bagi tunanetra

Dalam Kehidupan sehari – hari pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga Negara, yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia. Oleh karena itu setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan sehingga setiap warga berkewajiban memberikan pendidikan pada warganya tanpa terkecuali dan setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang berkubutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal). Dengan kata lain, pendidikan yang sesuai untuk anak penyandang cacat adalah pendidikan luar biasa.

Pendidikan luar biasa sebagai bagian dari pendidikan nasional yang diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan, karena merupakan hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa disebut Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB merupakan tempat untuk anak yang memiliki keterbatasan secara fisik atau mental, dimana anak – anak tersebut mendapatkan pendidikan secara khusus agar menjadi anggota masyarakat yang berguna dan memiliki kepercayaan pada diri sendiri yang diperoleh melalui pendidikan. Berdasarkan Sapariadi (1982 : 24) menyebutkan bahwa terdapat beberapa landasan yuridis yang mendasari perlunya pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, yaitu Dasar Pendidikan Nasional Indonesia ialah falsafah Negara Pancasila yang terdapat pada ayat satu, dua dan lima yang menyatakan bahwa anak berkelainan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1), pasal 31 ayat (1), Undang – undang Pokok Pendidikan No. 12 Tahun 1954 pada Pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (5) menjelaskan bahwa anak berkelainan pun berhak dan mutlak perlu untuk memperoleh pendidikan. Oleh sebab itu atas dasar pasal – pasal tersebut serta kaitannya dengan undang-undang wajib belajar, maka jelas bahwa pendidikan dan pengajaran meliputi seluruh warga negara sehingga jelas bahwa anak berkebutuhan khusus pun tanpa adanya diskriminasi berhak dan wajib memperoleh pendidikan.

Di samping itu strategi pembangunan yang telah dirumuskan di dalam GBHN dinyatakan bahwa penduduk adalah merupakan salah satu modal dasar. Oleh karena itu ditinjau dari segi kepentingan pembangunan itu sendiri, seperti anak - anak pada umumnya, anak berkebutuhan khusus pun jika mendapat pendidikan yang tepat sesuai dengan keadaan dan kemampuannya, mereka akan dapat pula berfungsi sebagai potensi pembangunan.

Tunanetra merupakan orang yang mengalami gangguan pada indera penglihatannya, yang ketunanetraannya digolongkan menjadi buta total (*Totally Blind*) dan yang masih memiliki sisa penglihatan (*Low Vision*). Gangguan ini membatasi tunanetra untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan fisik secara visual. Beberapa konsep informasi, seperti ukuran, bentuk, warna, lokasi, waktu, arah, dan jarak, tidak mudah didapatkan tunanetra, sehingga mereka menggunakan alat indera yang lain untuk mendapatkan informasi tersebut dan mengetahui kondisi fisik di sekitarnya.

1.1.2 Perkembangan Tunanetra di Malang, Jawa Timur

Indonesia mempunyai persentase yang cukup tinggi untuk penyandang tunanetra. Berdasarkan survey Indera Penglihatan dan Pendengaran tahun 1993-1996 menyebutkan bahwa kebutaan di Indonesia sebesar 1,5 % dan merupakan presentase paling tinggi di Asia dibandingkan dengan Banglades 1%, India 0,7% dan Thailand 0,3%. Artinya jika ada 12 penduduk dunia, buta setiap 1 jam atau empat diantaranya berasal dari Asia Tenggara dan dipastikan 1 orang diantaranya merupakan penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa pada tahun 2025 penduduk usia lanjut meningkat menjadi 414% dibandingkan dengan tahun 1990. Masyarakat Indonesia berkecenderungan menderita kebutaan 15 tahun lebih cepat dibandingkan di daerah subtropis (Djunaedi, 2010 : 45).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam angka tahun 2011, saat ini terdapat sekitar 197.080 penyandang tunanetra di Indonesia. Dari total penyandang tunanetra tersebut menjelaskan bahwa jumlah tunanetra di Indonesia merupakan angka yang cukup tinggi. Dimana total penyandang tunanetra ini tersebar ke dalam kepulauan Indonesia dengan jumlah penyandang tunanetra yang berbeda. Menurut Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Orang penyandang Cacat Tahun 2012 menyebutkan bahwa Jawa Timur memiliki populasi tingkat kecacatan yang paling tinggi yaitu 541.548 terutama tunanetra yaitu sebesar 338.672 jiwa. Selain itu, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007, Jawa Timur mempunyai persentase

kebutaan yang sama dengan persentase nasional, yaitu 0,9 % dan persentase *Low Vision* lebih tinggi dari persentase Nasional, yaitu 5,6 % pada Jawa Timur dan 4,8 % pada tingkat Nasional. Tidak semua wilayah di Jawa Timur memiliki presentase kebutaan yang sama. Terdapat sembilan kota besar yang memiliki presentase kebutaan yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika dari Jawa Timur dalam Angka Tahun 2013, menyebutkan bahwa dari 9 kota besar di Jawa Timur tersebut yang memiliki tingkat populasi penyandang tunanetra yang paling tinggi adalah wilayah Malang. Berikut ini merupakan rincian jumlah penyandang tunanetra di Jawa Timur, sebagai berikut : wilayah Kediri memiliki penyandang tunanetra sebanyak 870 orang, Blitar sebanyak 467 orang, Malang sebanyak 874 orang, Probolinggo sebanyak 500 orang, Pasuruan sebanyak 488 orang, Mojokerto sebanyak 705 orang, Madiun sebanyak 428 orang, Surabaya sebanyak 99 orang dan Batu sebanyak 59 orang. Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut wilayah Malang merupakan lokasi yang sangat berpotensi untuk mengembangkan pendidikan luar biasa bagi tuna netra.

Menurut Badan Pusat Statistika Jawa Timur yang terdapat pada Buku Jawa Timur dalam Angka Tahun 2013, menjelaskan bahwa wilayah Malang juga memiliki presentase penyandang tunanetra yang lebih tinggi dari pada penyandang tuna lainnya. Berikut ini merupakan rincian jumlah ketunaan di wilayah Malang, sebagai berikut : penderita cacat tubuh sebanyak 306 orang (kota sebanyak 274 orang dan kabupaten sebanyak 32 orang), tunanetra sebanyak 874 orang (kota sebanyak 812 orang dan kabupaten sebanyak 62 orang), tunarungu dan tunawicara sebanyak 843 orang (kota sebanyak 794 orang dan kabupaten sebanyak 46 orang), serta tunagrahita sebanyak 494 orang (kota sebanyak 294 orang dan kabupaten sebanyak 200 orang). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penyandang tunanetra di wilayah Malang merupakan angka yang cukup tinggi, selain itu, saat ini jumlah tunanetra di wilayah Malang dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan dari 216 hingga 874 jiwa. Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut, penyandang tunanetra merupakan aspek yang sangat berpotensi untuk dikembangkan.

Jumlah penyandang cacat netra di Malang berdasarkan umurnya terbagi menjadi tiga, yaitu 10.03 % (88 anak) diantaranya adalah anak-anak usia 6-12 tahun, 24.45 % (214 anak) diantaranya adalah anak-anak usia 12-15 tahun serta 21.42 % (188 anak) diantaranya anak-anak yang usia 15-18 tahun. Oleh karena itu, penyandang tunanetra yang berumur 12-15 tahun merupakan objek yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan pendidikan luar biasa

bagi tunanetra. Berdasarkan total penyandang cacat netra di Indonesia hanya sekitar 1% atau 2046 orang yang memperoleh pendidikan terpadu di SLB. Adapun Usaha penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemenuhan akan adanya fasilitas khusus bagi penyandang tunanetra yaitu dalam bentuk Sekolah Luar Biasa bagian A (SLB A), Panti Sosial Bina Netra (PSBN), dan fasilitas pendidikan terpadu lainnya baik formal maupun informal. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam angka tahun 2011 yang ada, sekitar 195000 penyandang tunanetra tidak belajar pada pendidikan terpadu di SLB. Jumlah ini dapat terjadi karena kurangnya jumlah fasilitas yang tersedia bagi penyandang tunanetra di Indonesia untuk mengenyam pendidikan formal maupun informal.

1.1.3 Perlunya Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa bagi tunanetra di Malang

Menurut hasil dari SLB ABCD PGRI Kalipuro, Jawa Timur yang diakses pada tahun 2012 melalui <http://slbkalipurobwi.blogspot.com/p/daftar-penyelenggara-pendidikan-luar.html>, menyebutkan bahwa daftar jumlah pendidikan luar biasa khusus tunanetra di Jawa Timur, hanya terdapat 5 sekolah luar biasa saja, yaitu di wilayah Pasuruan, Surabaya, Bojonegoro, Ponorogo dan Trenggalek. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah Malang masih belum memiliki penyelenggara pendidikan luar biasa khusus tunanetra. Padahal pendidikan luar biasa diperlukan untuk kelak mereka dapat berkontribusi dalam masyarakat demi kesejahteraan hidup mereka pada khususnya dan orang lain pada umumnya.

Wilayah Malang memiliki penyediaan fasilitas sekolah menengah pertama luar biasa sebanyak 15 SMPLB. Tetapi diantara 15 SMPLB ini yang menangani murid tunanetra hanya ada 2 sekolah luar biasa saja, yaitu Sekolah Luar Biasa Kedungkandang dan Sekolah Luar Biasa Bhakti Luhur. Mirisnya dua sekolah ini ternyata memiliki murid tunanetra sebanyak 12 murid. Jumlah penyandang netra yang memperoleh pendidikan luar biasa ini tidak sebanding dengan jumlah total penyandang netra yang ada di wilayah Malang.

Selain jumlah penyediaan fasilitas pendidikan yang tidak sebanding, menurut hasil wawancara dengan guru SMPLB Negeri Pasuruan, menjelaskan bahwa penggabungan tunanetra dengan siswa yang memiliki ketunaan yang lain akan menyebabkan ketergangguan konsentrasi pembelajaran jika terdapat kegaduhan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Oleh karena itu, seperti halnya orang normal, tunanetra berhak memperoleh perlakuan khusus untuk menjalani kehidupan tanpa diskriminasi. Sehingga meskipun memiliki kekurangan dalam hal

penglihatan, seorang tunanetra juga harus mendapatkan pelayanan pendidikan secara nyaman dan tenang dengan menyediakan fasilitas sekolah khusus tunanetra. Hal inilah yang dirasakan perlunya perancangan sebuah kompleks pendidikan bagi tunanetra.

Mengacu pada peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pelayanan Disabilitas di Kota Malang menjelaskan bahwa fasilitas disabilitas akan direncanakan di Kota Malang dalam meningkatkan sumber daya manusia dan menjadikan Kota Malang sebagai kota disabilitas. Oleh karena itu, perancangan sekolah tunanetra menengah pertama luar biasa khusus tunanetra ini merupakan tindakan kongkrit dalam memberikan pelayanan khusus bagi tunanetra.

Dalam perancangan sekolah menengah pertama luar biasa khusus tunanetra ini, pemilihan tapak memerlukan pertimbangan khusus dalam menentukan lokasi tapak sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu penentuan tapak akan berdasarkan garis radius dari 15 SMPLB umum tersebut. Dengan pertimbangan bahwa tunanetra membutuhkan kemudahan aksesibilitas menuju tapak dan dapat dicapai dengan kendaraan umum. Dari ke-lima belas SMPLB umum tersebut, perbesaran sekolah terletak pada wilayah Kepanjen, Sumberpucung, Pakisaji, Tumpang, Lawang, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang. Berdasarkan perencanaan lingkungan permukiman kota departemen pekerjaan umum, bahwa standar pelayanan sekolah menengah pertama luar biasa harus memiliki radius 1500 kilometer. Jadi apabila dilihat dari persebaran sekolah ini, wilayah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang memiliki jangkauan radius yang cukup berdekatan. Selain itu, berdasarkan standar pelayanan sekolah menengah pertama luar biasa, pemilihan lokasi tapak juga harus mempertimbangkan jumlah penduduk yang ada, yaitu minimal sebesar 25.000 penduduk. Kemudian apabila dilihat dari jumlah penduduk dari ke-empat kecamatan tersebut, persyaratan tersebut sudah memenuhi standar dari pelayanan SMPLB. Oleh karena itu, peneliti menentukan lokasi tapak dari perencanaan sekolah menengah pertama luar biasa ini yaitu berada pada kawasan Malang Tengah tepatnya pada Jalan Sunandar Priyo Sudarno. Pada kawasan tersebut merupakan pertemuan garis radius pada setiap sekolah serta pencapaian ke dalam tapak cukup dekat dengan radius sekolah lainnya.

Tidak hanya itu, selain memerlukan kemudahan akses menuju tapak, tunanetra juga memerlukan pelatihan kemandirian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan wawancara dengan pihak pertuni di Malang, siswa tunanetra juga harus dapat menjadi orang yang mandiri sejak mereka bersekolah, karena dalam kemandirian dapat mempermudah

tunanetra dalam beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemandirian tunanetra dapat dilatih secara bersamaan baik di lingkungan sekolah maupun di tempat tinggalnya. Karenanya selain bantuan dari orang lain, ruang yang mereka tempati juga berpengaruh terhadap kemandirian tunanetra, sehingga akan sangat penting bagi tunanetra merasa senang ketika berada pada suatu ruang. Ruang yang menyenangkan bagi tunanetra yaitu sudah dan mudah dikenali, aman, memiliki kemudahan dalam beraksesibilitas, tidak ada hiasan-hiasan yang berbahaya, serta tidak berisik (tenang).

1.1.4 Keterampilan orientasi dan mobilitas sebagai dasar pelatihan kemandirian tunanetra

Melatih kemandirian tunanetra dapat dilakukan dengan melatih ketajaman indera lain tunanetra selain indera penglihatan. Mereka akan belajar mengenali benda-benda yang berada di sekitar mereka, seperti rangsangan bau, peraba, pantulan bunyi, dan arah angin. Perbedaan sensor yang mereka tangkap merupakan informasi yang penting bagi tunanetra dalam beraksesibilitas di dalam dan di luar bangunan sebagai penanda ruang serta mampu membantu proses orientasi dan mobiltas siswa tunanetra. Sehingga semakin jelas sensor yang mereka tangkap, maka semakin banyak dan semakin mudah mereka dalam beraktifitas.

Melatih kemandirian ini dapat dicapai dengan memberikan pemahaman terkait komponen orientasi dan mobiltas bagi tunanetra. Komponen orientasi dan mobilitas ini berupa pemahaman *landmarks*, *compass direction*, *Clue*, *measuring* dan *numbering system*. Kelima komponen ini merupakan dasar pengakraban diri terhadap lingkungan. Diharapkan dengan kelima komponen ini dapat menumbuhkan rasa kemandirian tunanetra dalam beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari (Raharja, 2008).

Keterampilan orientasi dan mobiltas ini dapat memberikan siswa tunanetra pengetahuan mengenai konsep tubuh, konsep bergerak, dan teknik berjalan yang benar baik ditempat yang belum mereka kenal maupun sudah dikenal, baik di dalam maupun di luar bangunan. Dengan demikian pelatihan keterampilan orientasi dan mobilitas ini dapat membantu siswa tunanetra dalam mengembangkan kemandirian mereka (Raharja, 2008)

Berdasarkan wawancara dengan pihak pertuni di Malang, dalam berbagai kesempatan waktu dan tempat dari segala satuan kegiatan tunanetra, sekolah merupakan wadah dalam melatih kemandirian ini, sebab selain sebagai tempat belajar, sebagai tempat bermain dan

bersosialisasi dengan orang lain, juga berperan penting dalam mengembangkan kemandirian tunanetra. Kemandirian ini dapat tercapai dengan memberikan pemahaman terkait orientasi dan mobilitas bagi tunanetra. Oleh karena itu, perlu adanya desain khusus untuk menyesuaikan kebutuhan anak tunanetra. Selain mewadahi kebutuhan dan aktivitas anak, elemen arsitektur dapat menjadi aspek utama yang diperhatikan untuk membantu tunanetra dalam membiasakan diri dalam memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai acuan orientasi dan mobilitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat permasalahan yang menjadi dasar diperlukannya perancangan sekolah menengah pertama luar biasa khusus tunanetra di Malang. Sarana pendidikan ini bertujuan untuk membantu anak tunanetra yang belum memperoleh pendidikan luar biasa demi meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan hidup mereka pada khususnya dan orang lain pada umumnya. Sekolah menengah pertama luar biasa khusus tunanetra ini akan dibatasi pada skala Malang raya saja, untuk memudahkan dalam pemahaman karakter siswa tuna netra dalam berkegiatan sehingga akan lebih mudah dalam pemenuhan kebutuhan siswa nantinya. Perancangan sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas asrama guna mengakomodasi siswa tunanetra yang berasal dari kabupaten Malang, namun nantinya detail orientasi dan mobilitas hanya akan diterapkan pada elemen arsitektur yang memang menjadi konsentrasi utama dalam perancangan sekolah tunanetra ini.

Dengan adanya pedoman orientasi dan mobilitas sebagai pendekatan desain yang sesuai dengan karakter khusus siswa tunanetra, maka diharapkan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Khusus Tunanetra ini dapat menjadi sebuah model yang dapat digunakan dalam merancang sekolah khusus tunanetra selanjutnya, yang spesifik sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kegiatan tunanetra.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas beberapa identifikasi masalah yang ditemukan adalah :

1. Jumlah tunanetra di Malang lebih tinggi daripada di kota lainnya di Jawa Timur, yaitu sekitar 874 jiwa
2. Perkembangan jumlah tunanetra di Malang pada tahun 2011 - 2013 meningkat mulai dari 214 hingga 874 jiwa.

3. Jumlah anak tunanetra yang berumur 12 – 15 tahun lebih tinggi dari pada jumlah anak tunanetra lainnya, yaitu 24,45 % (214 anak) dari jumlah keseluruhan tunanetra di Malang.
4. Jumlah anak tunanetra yang bersekolah di SMPLB di Malang tidak sebanding dengan jumlah anak tunanetra yang ada di Malang, yaitu sekitar 202 anak tunanetra yang berumur 12- 15 tahun belum memperoleh pendidikan.
5. Belum adanya sekolah menengah pertama luar biasa khusus tunanetra di Malang.
6. Kurang nyamannya penggabungan ruang kelas antara anak tunanetra dengan anak yang memiliki ketunaan lain, karena menimbulkan keluhan apabila terjadi kegaduhan di dalam kelas, maka diperlukan sarana pendidikan dengan sasaran pendidikan khusus tunanetra.
7. Perlunya pelatihan kemandirian bagi tunanetra dengan memberikan keterampilan orientasi dan mobilitas sebagai kebutuhan dasar tunanetra.
8. Pelatihan Orientasi dan Mobilitas ini dapat dibantu dengan penggunaan elemen arsitektural sebagai acuan orientasi dan mobilitas

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari dasar pemikiran diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam perancangan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa bagi Tunanetra dengan pendekatan orientasi dan mobilitas di Malang ?

1.4 Batasan Perancangan

Lingkup/cakupan dari perancangan ini adalah di maksudkan agar fokus perancangan tidak meluas, di antara lingkup tersebut adalah :

1. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Tunanetra di Malang.
2. Menerapkan komponen orientasi dan mobiltas pada elemen arsitektural untuk melatih kemandirian siswa tunanetra.

1.5 Tujuan

Tujuan dari perancangan ini sebagaimana diuraikan dalam rumusan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Merancang Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Tunanetra di Malang yang mampu melatih kemandirian tunanetra dengan cara memberikan pemahaman orientasi dan mobilitas pada elemen arsitektural sebagai acuan orientasi dan mobilitas.

1.6 Manfaat

- Bagi Akademik
 1. Sebagai rekomendasi desain berupa Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa untuk tunanetra.
 2. Diharapkan skripsi ini dapat dikembangkan lagi dengan beberapa teori maupun terapan untuk memunculkan alternatif – alternatif baru mengenai pengembangan orientasi dan mobilitas bagi tunanetra.
- Bagi Masyarakat Umum
 1. Sebagai bahan informasi mengenai tunanetra dalam bidang orientasi dan mobilitas.
 2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu contoh pedoman orientasi dan mobilitas sebagai dasar pelatihan kemandirian tunanetra. Masyarakat dapat mengetahui kegunaan keterampilan orientasi dan mobilitas serta memanfaatkannya secara arif.
- Bagi Pemerintah
 1. Menunjang program kota Malang Sebagai Kota Disabilitas pada tahun 2015. Demi membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia seluruhnya.
 2. Diharapkan dari penulisan skripsi ini pemerintah memiliki alternatif lebih tentang bagaimana menanggulangi permasalahan perancangan sekolah yang masih kurang memenuhi standar disabilitas, khususnya tunanetra. Dan pemerintah dapat mengetahui tentang pentingnya orientasi dan mobilitas bagi tunanetra serta bagaimana menerapkan komponen orientasi dan mobilitas ini secara arif.